

**PENGARUH LIKUIDITAS, MANAJEMEN LABA DAN  
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**LUCY TANIA YOLANDA PUTRI**

**2010/56328**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

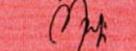
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH LIKUIDITAS, MANAJEMEN LABA DAN CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)**

**Nama** : Lucy Tania Yolanda Putri  
**NIM/BP** : 56328/2010  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Keuangan  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Januari 2014

**Tim Penguji**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Ketua	: Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Salma Taqwa, SE, M.Si	
3. Anggota	: Charoline Cheisvianny, SE, M. Ak	
4. Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.SI, Ak	

## ABSTRAK

**Lucy Tania Yolanda Putri (56328/2010). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba, dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Agresivitas pajak perusahaan merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik itu secara legal maupun ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara likuiditas, manajemen laba dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari *www.idx.co.id*. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi berganda dengan SPSS 16.0.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Likuiditas ( $X_1$ ) yang diukur dengan *current ratio*(LIQ) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (Y), 2) manajemen laba ( $X_2$ ) yang diukur dengan *discretionary accrual*(DA) memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (Y), dan 3) corporate governance yang diukur dengan proporsi komisaris independen (KOM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lain yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan diantaranya profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan komite audit.

**Kata Kunci :Agresivitas pajak perusahaan, Likuiditas, Manajemen laba dan Corporate Governance**

## **ABSTRACT**

*Tax aggressive was the action to reduce taxable income appropriate to tax plan which could be legal or ilegal. This study ivestigated if extend of liquidity, earning management and corporate governance affected corporate tax aggresiveness.*

*This study was a causative study. Population in this study manufacture company that registered in Indonesia stock exchange (BEI) from 2008 until 2012. The sample was choosed by purposive sampling methode. Data used in this study was secunder data from [www.idx.id](http://www.idx.id). Technic of Collecting data was documentation technic. Data was analyze by multiple regression analysis with SPSS 16.0.*

*The result of the hypothesis was that : 1) liquidity measured by current ratio that had no signifficant negative impact to tax agresive, 2) Earning Management measured by that had no signifficant positive impact to to tax agresive, 3) corporate governance measured by independent commissioners that had signifficant to negative impact to to tax agresive measured by Effective Tax Rate (ETR).*

*Advisable to research further we recommend analysis by add variables such as profitabilty, financialleverage, the size of the researh companies, institutional investor and audit committe.*

***Keyword : Corporate Tax Aggresiveness, Liquidity, Earning Management and Corporate Governance***

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami penulis. Namun hambatan itu dapat diatasi berkat bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fefri Indra Arza SE, M.SC, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Salma Taqwa SE. M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak selaku penelaah dan Ibu Nurzi Sebrina SE, M.Si, Ak selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kepada Ibunda tercinta Busniwati, dan Ayahanda tercinta Basrizal K. Adan saudara sekaligus inspirator Rica Elvira S.S serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa suamiku tersayang Giantio Anartha Frinandes yang telah memberikan segala bentuk dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Para sahabat terbaik Gusti Maya Sari, Melinda, Yusvika Pitri Handayani, Wirna Yola Agusti, Iftahul Rezki, Nike Meilissa Zullfi, Feby Loviana Nazaf, dan Rahmy yang sama-sama berjuang dari awal menimba ilmu di bangku perkuliahan hingga saat ini saling memberikan dukungan serta do'a.
11. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.

12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 10 januari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Agresivitas Pajak Perusahaan .....	8
a. Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak Perusahaan ..	12
b. Pengukuran Agresivitas Pajak Perusahaan.....	13
c. Pajak Penghasilan Badan di Indonesia.....	14
2. Likuiditas .....	16
a. Pengukuran Likuiditas.....	17
3. Manajemen Laba .....	18
a. Motivasi Penyebab Manajemen Laba .....	19

b. Pola Manajemen Laba .....	20
c. Mekanisme Manajemen Laba .....	20
4. <i>Corporate Governance</i> .....	21
a. Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	22
b. Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	23
c. Karakteristik <i>Corporate Governance</i> .....	26
d. Tanggung Jawab Komisaris Independen.....	27
e. Tugas Komisaris independen .....	28
5. Evaluasi terhadap Hasil Penelitian Terdahulu .....	29
B. Kerangka Konseptual .....	34
C. Hipotesis .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Objek Penelitian .....	36
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Variabel Penelitian .....	38
G. Pengukuran Variabel .....	39
H. Teknik Analisis Data .....	45
I. Defenisi Operasional .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	50
--------------------------	----

1. Perkembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	50
2. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	52
B. Deskriptif Variabel Penelitian .....	54
C. Statistik Deskriptif .....	66
D. Hasil Uji Asusmsi Klasik .....	69
E. Analisis Data .....	76
F. Pembahasan .....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Keterbatasan Penelitian .....	86
C. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
.....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	93
.....	

## DAFTAR TABEL

<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pengukuran Agresivitas Pajak .....	13
2. Evaluasi Atas Penelitian Terdahulu .....	29
3. Kriteria Pemilihan Sampel .....	37
4. Klasifikasi Nilai d .....	44
5. Deskripsi Sampel Penelitian .....	53
6. Data Hasil Perhitungan ETR .....	55
7. Data Hasil Perhitungan Likuiditas .....	57
8. Data Hasil Perhitungan Manajemen Laba .....	60
9. Data Hasil Perhitungan Corporate Governance .....	64
10. Deskriptif Statistik .....	66
11. Hasil Uji Normalitas Residual Sebelum Transformasi .....	70
12. Hasil Uji Normalitas Residual Setelah Transformasi .....	72
13. Hasil Uji Multikolinieritas .....	73
14. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	74
15. Hasil Autokorelasi .....	75
16. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	76
17. Hasil Uji F .....	77
18. Hasil Analisis Regresi Berganda .....	78

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nama Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Konseptual .....	35
2. Uji Normalitas Sebelum Transformasi .....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nama Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Perusahaan Sampel .....	94
2. Likuiditas Perusahaan Sampel .....	96
3. Manajemen Laba Perusahaan Sampel .....	97
4. Corporate Governance Perusahaan Sampel .....	99
5. Agresivitas Pajak Perusahaan Sampel .....	101
6. Hasil Pengolahan Data Statistik dengan Program SPSS.....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh orang atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sebagai unsur penerimaan negara, pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id>), realisasi penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2008 mencapai Rp. 658,701 milyar. Tahun 2012 jumlah realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1,016,237 milyar atau meningkat 64,81% dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2012, pajak penghasilan menyumbang 37,84% atau sebesar Rp. 513.650 milyar dari seluruh realisasi APBN tahun 2012. Begitu besarnya penerimaan pajak dalam APBN, maka sudah selayaknya bila sektor perpajakan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang signifikan kepada perusahaan dan pemegang saham sehingga pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak

menutupkemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chenet *al.* 2010).

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Beberapa peneliti dan literatur menjelaskan defenisi agresivitas pajak secara lebih spesifik. Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2012) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Timothy (2010) menjelaskan agresifitas pajak dapat dilihat dengan dua cara yaitu, pertama secara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, dan merupakan layanan yang sah yang diberikan oleh akuntan disebut dengan *tax avoidance*, dan cara kedua adalah *tax sheltering* yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk *tax planning* yang dilakukan secara ilegal yaitu *tax sheltering* dan *tax evasion*, pada intinya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang. Selain itu dapat

disimpulkan juga bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan dan tindakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan meminimalkan nilai perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Beberapa diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah.

Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2012). Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Faktor lain yang diprediksi dapat menyebabkan agresivitas pajak perusahaan adalah manajemen laba. Menurut Scott (2009) salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak

manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan.

Manajemen laba memungkinkan perusahaan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Penelitian sebelumnya yang dilakukan krisnata (2012) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

Selain likuiditas dan manajemen laba peneliti juga menganalisis struktur tata kelola perusahaan yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak, yaitu *Corporate Governance*. *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. Dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak.

Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Maka, secara implisit dapat dikatakan bahwa *corporate governance* dan agresivitas pajak memiliki hubungan, karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan dalam struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah

perusahaan memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain agresifitas pajak juga tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link, dan Mayer 2006).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sartori (2009), Sari dan Martani (2010) serta Timothy (2010) mengungkapkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh positif dalam tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, sehingga akan meminimalkan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Sehingga penerapan *Good Corporate Governance* berhasil menekan tindakan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Hanlon dan Slemrod (2009) memberikan bukti bagaimana pasar bereaksi atas berita tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi negatif atas berita tersebut. Namun besaran reaksi akan lebih positif bagi perusahaan yang memiliki tata kelola yang lebih baik.

Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan antara likuiditas (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005), manajemen laba (Krisnata, 2012) dan *Corporate Governance* (Minnick dan Noga, 2010) terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 hingga 2012. Lebih dari itu penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai pengukuran agresivitas pajak perusahaan seperti yang digunakan oleh Chen dkk. (2010) dan dirangkum oleh Hidayanti (2013). ETR dianggap mampu merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan

laba fiskal. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel dikarenakan industri ini memiliki berbagai sub sektor industri yang diharapkan dapat mewakili sektor-sektor industri lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh likuiditas, manajemen laba dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan, studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ?
2. Sejauhmana manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan ?
3. Sejauhmana *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk menentukan :menemukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3. Pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh likuiditas, manajemen laba dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan perusahaan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Serta memberikan masukan kepada investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang taat terhadap pajak.
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, atau bukti empiris tambahan mengenai likuiditas, manajemen laba dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Agresivitas Pajak Perusahaan

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Frank dkk. (2009), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Sari dan Martani (2010) juga menyatakan suatu agresivitas pelaporan pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan secara legal maupun ilegal ketika

perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan posisi akhir.

Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, *et. al.* (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan, *et. al.* (2012) juga berpendapat bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Demikian juga dengan Jimenez (2008) yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah.

Suandy (2011: 2) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap

pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa agresivitas pajak adalah suatu aktifitas yang menyangkut transaksi untuk menghindari pembayaran pajak atau membuat rendah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dan hal ini dapat terjadi apabila perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang lemah dan terdapat kesempatan untuk melakukan agresifitas tersebut.

Menurut krisnata (2012) agresivitas pajak merupakan pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien yang mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah suatu bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak. Sedangkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan sebuah perencanaan pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti dengan tidak melaporkan penjualan secara benar atau membuat biaya fiktif. Pada umumnya tingkat agresivitas pajak dipengaruhi oleh faktor manfaat dan risiko yang ditimbulkannya.

Timothy (2010) menjelaskan agresifitas pajak dapat dilihat dengan dua cara yaitu, pertama secara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, dan merupakan layanan yang sah yang diberikan oleh akuntan disebut dengan *tax avoidance*, dan cara kedua adalah *tax sheltering* yaitu upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

Meskipun terdapat perbedaan istilah untuk *tax planning* yang dilakukan secara ilegal yaitu *tax sheltering* dan *tax evasion*, pada intinya dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan dan tindakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan meminimalkan nilai perusahaan.

Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2012) . Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan pajak dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba menurut Scott (2009) adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan suatu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. Perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba, maka dapat dikatakan tingkat agresivitas perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

Frank, Lynch, dan Rego (2006) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai manajemen ke bawah dari kegiatan kena pajak penghasilan melalui perencanaan pajak. mengelola pajak adalah bagian penting dari pekerjaan seorang manajer, karena pajak merupakan biaya yang signifikan untuk perusahaan dan pemegang saham.

a. Keuntungan dan Kerugian dari Agresivitas pajak

Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak agresif, para pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan.

Ada tiga keuntungan tindakan Agresivitas pajak menurut Chen *et al.* (2010):

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara (*marginal benefit*), sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang semakin besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi atas kinerjanya dari pemilik / pemegang saham perusahaan karena menghasilkan beban pajak yang harus dibayarkan semakin rendah.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* merupakan suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun melakukan

transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif (Desai dan Dharmapala, 2006).diantaranya adalah :

1. *Marginal cost* yang mungkin terjadi akibat sanksi administrasi/penalti dari fiskus pajak saat ditemukannya kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan pada perusahaan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

b. Pengukuran Agresivitas Pajak Perusahaan

Terdapat 5 cara yang dapat digunakan dalam mengukur pajak agresif Hidayanti (2013). 5 cara tersebut dirangkum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Pengukuran Agresivitas Pajak**

<b>Pengukuran</b>	<b>Rumus</b>
<b>ETR<sub>it</sub></b>	$\frac{\text{Total Tax Expense}_{it}}{\text{PreTax income}_{it}}$
<b>CETR<sub>it</sub></b>	$\frac{\text{Cash Tax paid}_{it}}{\text{PreTax income}_{it}}$
<b>BTD-Mpi</b>	$\frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{\text{Total Aset}_{it-1}}$
<b>BTD-Ddit</b>	$B_1 TA_{it} + \mu_1 + \epsilon_{it}$
<b>TAXPLAN<sub>it</sub></b>	$\frac{t^{-2} - [PTI \approx 28\% - \text{current positional of total tax expense}]:3}{\text{Ending asset}_t}$

Dimana *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi

pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank *et al.* 2009). *Cash Effective Tax Rate (CETR)* digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.* 2010). *Book-Tax Difference Manzon-Plesko (BTD\_MP)* dan *Book-Tax Difference Desai-Dharmapala (BTD\_DD)* digunakan untuk mendapatkan trigulasi, menurut Desai dan Dharmapala (2006) *book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba, maka nilai residu dari regresi nilai *book-tax difference* dan nilai total akrual diharapkan murni merupakan cerminan dari aktivitas perencanaan pajak. Sedangkan *TAXPLAN* digunakan untuk menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan (Yin dan Cheng 2004).

### **c. Pajak Penghasilan Badan di Indonesia**

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan, pemerintah menetapkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarifnya bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dikategorikan dalam tiga lapisan, yaitu PKP sampai dengan Rp. 50.000.000 dikenakan tarif pajak 10%, PKP dari Rp.50.000.000 hingga Rp. 100.000.000 dikenakan tarif pajak 15% dan untuk PKP diatas Rp. 100.000.000 dibebankan pajak sebesar 30%.

Undang-undang pajak penghasilan yang baru yaitu UU No. 36 tahun

2008 mencakup perubahan tarif pajak progressif menjadi tarif pajak tunggal sebesar 28% untuk tahun fiskal 2009 dan sebesar 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

Syarat-syarat yang diatur dalam peraturan pemerintahan tersebut untuk memperoleh tarif lebih rendah adalah:

- a. Merupakan wajib pajak dalam negeri berbentuk perseroan terbuka;
- b. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor;
- c. Saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak;
- d. Masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor;
- e. Dipenuhi dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto maksimal Rp. 50.000.000, mendapatkan fasilitas potongan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku umum. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan semakin meningkat.

## 2. Likuiditas

Subramanyam (2010:10) mengatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas perusahaan serta komponen asset dan kewajiban lancarnya.

Menurut Munawir (2002:31) likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Likuiditas juga merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar, besarnya perbandingan atau rasio terbaik antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah sekitar 2 : 1. Angka tersebut tidaklah mutlak, besarnya ratio dapat ditentukan sesuai dengan jenis usaha dan kebijakan keuangan masing-masing.

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Krisnata, 2012). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perusahaan yang relatif sulit dipecahkan. Dipandang dari sisi kreditur, perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi merupakan perusahaan yang baik, karena dana jangka pendek kreditur yang dipinjam perusahaan dapat dijamin oleh aktiva lancar yang jumlah relatif lebih banyak.

Tetapi jika dipandang dari sisi manajemen, perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja manajemen yang kurang baik karena likuiditas yang tinggi menunjukkan adanya saldo kas yang menganggur, persediaan yang relatif berlebihan, atau karena kebijakan kredit perusahaan yang tidak baik sehingga mengakibatkan tingginya piutang usaha.

a. Pengukuran likuiditas

Kasmir (2011:134) mengemukakan tiga rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rumus : Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio lancar (*current ratio*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.

2. Rasio kas (*Cash Ratio*)

$$\text{Rumus : Rasio Lancar} = \frac{\text{Kas+Surat Berharga}}{\text{Utang Lancar}}$$

Rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan kas dan surat berharga yang dapat segera diuangkan. Tidak terdapat standar likuiditas untuk *cash ratio* sehingga penilaiannya tergantung pada kebijakan manajemen.

### 3. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

$$\text{Rumus : Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{utang Lancar}}$$

Rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar. Persediaan dianggap aktiva lancar yang paling tidak lancar, karena untuk menjadi uang tunai (kas) memerlukan dua langkah terlebih dahulu, yaitu dijual secara tunai atau kredit lalu menjadi kas.

### 3. Manajemen Laba

Menurut Scoot (2009) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Manajemen laba merupakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost. Manajemen laba juga merupakan bentuk *efficient contracting*, dimana manajemen laba memberikan kepada manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan-perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Sejauh ini hanya model berbasis *Agregate Accruals Modified Jones Model* yang diterima sebagai model untuk mendeteksi manajemen laba (Alim, 2008). Komponen total akrual dalam *Modified Jones Model* terdiri dari *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*. *Discretionary accruals* merupakan

komponen total akrual yang berasal dari rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan nilai estimasi dalam metode akuntansi. Sedangkan, *non discretionary accruals* merupakan komponen total akrual yang diperoleh secara alami dari pencatatan akuntansi yang diterima umum.

**a. Motivasi Penyebab Manajemen Laba**

Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba berdasarkan teori akuntansi positif (Watts & Zimmerman, 1986 dalam Wulandari, 2005, yaitu):

1) *Hipotesis Bonus Plan*

Bahwa pada perusahaan dengan *bonus plan* cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan *income* saat ini.

2) *Debt To Equity Hypothesis*.

Bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* besar maka manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan atau laba.

3) *Political Cost Hypothesis*

Bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan.

Scoot (2009) menambahkan ada beberapa motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba yaitu motivasi pajak, pergantian CEO, penawaran saham perdana (IPO), motivasi pasar modal.

Berkaitan dengan motivasi pajak, pemilihan metode akuntansi dalam pelaporan laba akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak. Perusahaan besar lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi profit yang dilaporkan daripada perusahaan kecil (Belkaoui, 2000).

**b. Pola Manajemen Laba**

Terdapat beberapa pola manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, antara lain:

- 1) *Taking A Bath*, sering disebut big bath dan dilakukan agar laba pada periode berikutnya menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini dimungkinkan karena manajemen menghapus beberapa aktiva dan membebaskan perkiraan-perkiraan mendatang pada periode sekarang.
- 2) *Income decreasing*, dilakukan agar laba dari periode sekarang lebih rendah dari yang seharusnya.
- 3) *Income smoothing* (peralatan laba), merupakan bagian dari manajemen laba yang merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan perubahan atau merekayasa laba secara smooth atau lembut.

**c. Mekanisme Manajemen Laba**

Menurut Subramanyam (2010) dalam buku Analisis Informasi Keuangan Mekanisme Manajemen Laba antara lain :

1) Pemandahan Laba

Pemandahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode dengan periode lainnya. Pemandahan laba dapat

dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Bentuk manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu atau beberapa periode masa depan, seringkali satu periode berikutnya. Untuk alasan ini pemindahan laba sangat berguna untuk perataan laba.

## 2) Manajemen laba melalui klasifikasi

Laba juga dapat ditentukan secara khusus mengklasifikasi beban dan pendapatan pada bagian tertentu laporan laba rugi. Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan beban dibawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak berulang sehingga tidak dianggap penting oleh analis. Kasus ekstri dari bentuk manajemen laba ini adalah dengan membuat penyesuaian ekuitas langsung tanpa meletakkannya pada laporan laba rugi.

## 3. *Corporate Governance*

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan.

Sedangkan menurut Kim, Nofsinger, dan Mohr (2010), *corporate governance* adalah suatu sistem pengawasan dan penyeimbang yang terintegrasi serta rumit yang dilibatkan untuk mencegah serta mengatasi timbulnya konflik

yang dapat menyebabkan agency problem dimana pihak yang melakukan pemantauan dapat dibedakan menjadi pihak-pihak dari dalam struktur perusahaan, pihak yang berasal dari luar perusahaan dan berasal dari pemerintah.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan diantara berbagai pihak dalam perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan mencapai kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

**a. Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Dalam *corporate governance* terdapat beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip corporate governance ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Warsono, dkk (2010) dalam Hidayanti (2010) menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip dasar *corporate governance* yaitu *Transparency, Accountability and Responsibility, Independency, dan Fairness*.

**1. *Transparency* (transparasi)**

Dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan dalam perusahaan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi

yang sesungguhnya, dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2. *Accountability and Responsibility* (akuntabilitas dan pertanggungjawaban)

a. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu, kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

b. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu, kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

3. *Independency* ( independensi)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus membebaskan diri dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai.

4. *Fairness* (keadilan)

Dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan dalam perusahaan harus memperlakukan pihak lain secara adil berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berterima umum.

**b. Manfaat Corporate Governance**

Manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, (2001):

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholders.

2. Mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

Sedangkan menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG),(2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah:

1. Meminimalkan *agency cost*.

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan agar mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga biaya ataupun kerugian akibat dari manajemen dapat berkurang.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi

positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, dengan kemudahan dalam mendapatkan modal maka perusahaan dapat menciptakan barang-barang atau produk yang berkualitas serta kompetitif.

### 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Adanya penanaman modal yang besar oleh para investor akan menghasilkan peningkatan pada nilai saham perusahaan.

### 4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (image) suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut. *Corporate governance* dapat meningkatkan citra perusahaan karena dengan tata kelola perusahaan yang baik akan memperlihatkan bahwa operasi perusahaan tersebut dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturannya. Hasil yang akan didapatkan adalah kinerja perusahaan yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa perusahaan tersebut baik karena memiliki *good corporate governance*.

c. Karakteristik Corporate Governance

Karakteristik *Corporate Governance* berdasarkan keputusan Direksi PT. Bursa Efek Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor 1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat wajib memiliki sebagai berikut:

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris.
2. Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah tiga orang dan diketuai oleh seorang komisaris independen.
3. Sekretaris perusahaan.

Amri (2013) mengemukakan, dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas

dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

**d. Tanggung Jawab Komisaris Independen**

Menurut Amri (2013) Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- 2) Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- 3) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- 4) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan

yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

- 5) Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- 6) Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

**e. Tugas Komisaris independen**

- 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- 2) Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
- 3) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- 4) Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

## f. Evaluasi Atas Penelitian Terdahulu

Tabel 2  
Evaluasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Sampel	Hasil Penelitian
1.	Hidayanti (2013)	Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2008-2011	Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan <i>Corporate Governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.
2.	Suyanto, K.D (2012)	Likuiditas, leverage dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan	192 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2010	Menemukan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan sementara leverage dan manajemen laba berpengaruh positif.
3.	Hanlon, M. Dan Slemrod, J	What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement	108 perusahaan besar di Amerika Serikat tahun 1990-2004	Harga saham dan tindakan pajak agresif perusahaan mempunyai hasil yang signifikan secara statistik.
4.	Sari, D.K dan Martani D (2010)	Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif	135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2008	Perusahaan keluarga dan <i>corporate governance</i> terhadap tindakan pajak agresif berpengaruh negatif dan hasilnya tidak signifikan.
5.	Frank, Lynch and Rego (2008)	Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation To Aggressive Financial Reporting	155 perusahaan yang bergerak di penampungan pajak Amerika	Tindakan pajak agresif dan pelaporan keuangan berpengaruh positif dengan hasil signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mencoba menggabungkan antara likuiditas yang merupakan komponen kinerja keuangan yang pada dasarnya merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, dengan manajemen laba yang merupakan metode yang diterapkan untuk memenuhi keinginan manajemen dan corporate governance yang merupakan struktur tatanan dalam perusahaan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

## **B. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian teori dan evaluasi atas penelitian tersebut diatas, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

### **1. Hubungan Likuiditas dengan Agresivitas Pajak Perusahaan**

Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2012). Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan. Alasannya, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan pajak dapat digunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki

masalah dengan arus kas. Dengan kondisi keuangan dan arus kas yang baik maka perusahaan akan mampu menanggung biaya yang muncul seperti pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) dan Siahaan (2005) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran atas pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Krisnata (2012) menemukan bukti bahwa likuiditas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994), Siahaan (2005) serta Krisnata (2012) dan penjelasan hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak, kemudian dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## 2. Hubungan Manajemen Laba dengan Agresivitas Pajak Perusahaan

Menurut Scott (2009), salah satu alasan adanya manajemen laba adalah motivasi pajak. Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak berkaitan langsung dengan besarnya laba bersih perusahaan. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan.

Perusahaan lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak. Penelitian sebelumnya *Badertscher et al* (2009) menunjukkan bukti manajemen laba dijadikan alat bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dan Krisnata (2012) membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan dapat memilih strategi manajemen laba secara konservatif atau agresif. Bila strategi yang dipilih adalah konservatif maka penghematan dari pajak juga akan sedikit dan menandakan bahwa perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak perusahaan. Namun bila strategi agresif yang dipilih dalam manajemen laba maka perusahaan dianggap juga agresif terhadap pajak karena mengincar penghematan pajak yang besar pula. Frank *et al.* (2009) menemukan bahwa ada hubungan positif antara *aggressive financial reporting* yang diukur dengan *discretionary accrual* dan *tax reporting aggressiveness* yang diukur dengan *Effective Tax Rate*. Jadi jika perusahaan melakukan laporan keuangan secara

agresif, maka juga dilakukan rekayasa terhadap pelaporan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

### 3. Hubungan *Corporate Governance* dengan Agresivitas Pajak Perusahaan

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2003) mendefinisikan *Corporate Governance* (CG) sebagai suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan CG yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah.

Minnick dan Noga (2010) memperlihatkan bahwa penerapan mekanisme CG memiliki arah hubungan yang bervariasi terhadap pembayaran pajak. Hubungan negatif terhadap pembayaran pajak ditunjukkan oleh jumlah direksi, usia CEO, direksi independen, dan dualisme CEO sebagai ketua dewan. Tetapi hubungan positif ditunjukkan oleh kekuasaan manajerial terhadap pembayaran pajak.

Desai dan Dharmapala (2006) telah membuktikan bahwa kebijakan tindakan pengelolaan pajak pada perusahaan dipengaruhi oleh penerapan CG. Kualitas CG yang masih buruk dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih

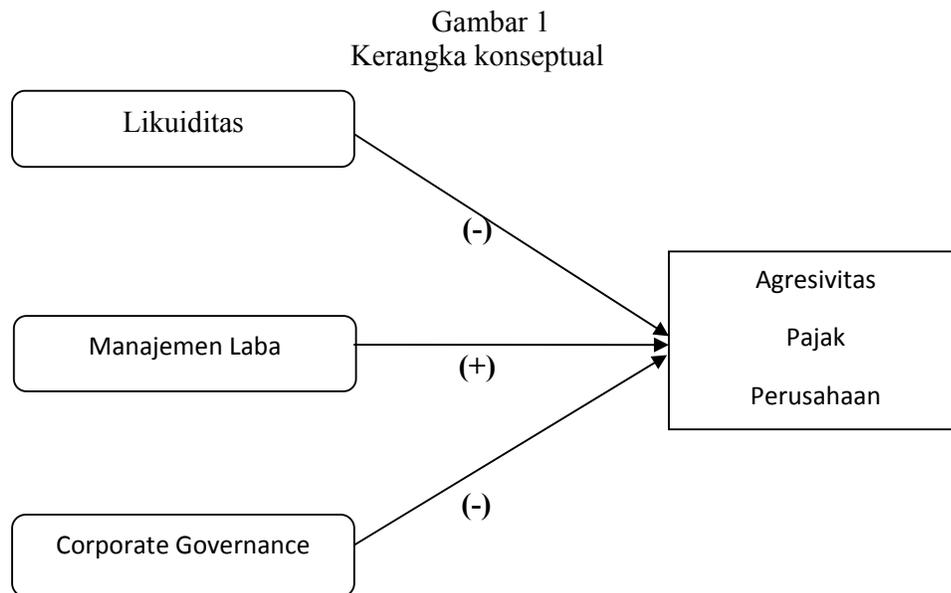
agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sejalan dengan Desai dan Dharmapala (2006), Sari (2010) dalam penelitiannya menemukan pengaruh negatif yang tidak signifikan atas penerapan CG terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskanlah hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : *Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

### C. Kerangka Konseptual

Hubungan antara likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan berbanding terbalik, semakin tinggi likuiditas yang dimiliki perusahaan kemungkinan perusahaan untuk agresif dalam pajaknya semakin rendah, karena perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban pajak. Manajemen laba terhadap agresivitas pajak sangat berpengaruh karena agresivitas pajak menyangkut tindakan yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan beban pajak salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *income decreasing* sehingga laba yang dilaporkan kecil dan beban pajak semakin rendah. Sementara itu aturan dan struktur tata kelola dalam *corporate governance* dapat dijadikan alat yang mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, semakin baik penerapan *corporate governance* dalam perusahaan maka tindakan yang menyangkut pajak agresif semakin rendah.

Gambar dari kerangka konseptual dalam penelitian dapat digambarkan seperti dibawah ini :



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, manajemen laba dan corporate governance terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga manajemen laba bukan untuk motivasi meminimalkan pajak yang ditanggung perusahaan.
3. *Corporate Governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

#### B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sampel penelitian ini sangat sedikit yaitu berjumlah 36 dan hanya menggunakan industri manufaktur, sehingga berakibat pada lemahnya validitas eksternal atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.

2. Nilai adjusted *R-Square* yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan seperti profitabilitas, *leverage*, struktur kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal.
3. Proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan menggunakan ETR, sehingga hanya melihat agresivitas pajak perusahaan dari satu sudut pandang.

### C. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan  
Perusahaan go-public agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan agresivitas pajak yang dilakukan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak.
2. Bagi investor  
Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan dengan Corporate Governance yang tinggi memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Sehingga bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disarankan untuk memilih perusahaan yang memiliki struktur tata kelola perusahaan (CG) yang baik, seperti perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang tinggi.
3. Bagi penelitian selanjutnya :

- a. Penelitian ini hanya meneliti aktivitas manajemen laba menggunakan discretionary accrual, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik analisa manajemen laba dalam konteks pajak seperti yang dilakukan Philips dkk (2003) menggunakan *Deferred Tax Expense* (DTE).
- b. Menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi agresivitas pajak yang belum diteliti, diantaranya seperti profitabilitas, *leverage*, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal .
- c. Menggunakan metode pengukuran *Corporate Governance* selain proporsi komisaris independen, seperti komite audit atau lembaga scoring seperti IICD dan IICG.
- d. Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti agresivitas pajak perusahaan pada seluruh sektor yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. 2009. “Manajemen Laba dengan Motivasi pajak pada Badan Usaha Manufaktur di Indonesia”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 13. No. 3 September 2009. hal. 444-461.
- Amri, G. 2013. “Komisaris independen dan GCG”. <http://www.GustiAmriGCG.htm>. Diakses tanggal 8 november 2013.
- Badertscher, B.A., Philips, J.D., Pincus, M., dan Rego, S.O. 2009. “Earnings Management Strategies and The Trade-Off Between Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or Not to Conform”. *The Accounting Review*. Vol.84. No.1. hal. 63-97.
- Balakrishnan, K., Blouin, J., and W. Guay. 2012.” Does tax aggressiveness reduce corporate transparency?”. Working paper, University of Pennsylvania.
- Belkaoui, A.R. 2007. *Accounting Theory 5th Edition*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Bradley & Cassie, F. 1994. “An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance Behavior”. Dissertation. (Tidak dipublikasikan). The University of Alabama USA.
- Chen, dkk. 2010. “Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-family Firms?”. *Journal of Financial Economics*. vol. 95. hal. 41-61.
- Desai M. A., and D. Dharmapala, 2006. “Corporate tax avoidance and high-powered incentives”. *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Dyreng, S., Hanlon, M., dan Maydew, E. 2010. “The effects of executives on corporate tax avoidance”. *The Accounting Review*. Vol. 85, No. 4, pp 1163-1189.
- Fatharani, Nazhaira. 2012. “Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif”.UI : Depok.
- Fama, E.F. dan Jensen, M.C. 1983. “Separation of ownership and control”. *Journal of Law and Economics*, vol. 26, hal. 301–325.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2003. Indonesia Company Law. <http://www.fcgi.org.id>. Diakses tanggal : 2 september 2013.